



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 1
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON 344-9230 (20 SALURAN) PSW. 5205, 5206, (021) 3843417, FAKSIMILE (021) 3454640, 3846402
SITUS www.perbendaharaan.go.id

Nomor : S-1640 /PB.1/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Evaluasi Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern
Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Periode Triwulan IV
Tahun 2017 Terkait Kinerja UKI Tingkat Wilayah (UKI-W)

20 Maret 2018

Yth. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan

Sehubungan pelaksanaan pemantauan pengendalian intern lingkup Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern di lingkungan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan merupakan bagian dari ruang lingkup unsur tugas kepatuhan internal yang terintegrasi dengan unsur pelaksanaan tugas UKI sesuai dengan KEP-800/PB/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor S-6456/PB.1/2017 tanggal 21 Juli 2017 hal Penjelasan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemantauan Pengendalian Intern.
2. Salah satu *output* pelaksanaan pemantauan pengendalian intern lingkup Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan adalah Laporan Akhir Triwulanan Tingkat Unit Kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang menyajikan hasil pelaksanaan pemantauan pengendalian intern terhadap 3 (tiga) kegiatan Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang ditetapkan.
3. Laporan Akhir Triwulanan Tingkat Unit Kerja tersebut disampaikan oleh seluruh Kanwil Ditjen Perbendaharaan kepada Sekretariat Ditjen Perbendaharaan selaku Unit Kepatuhan Internal tingkat eselon I Ditjen Perbendaharaan (UKI-E1).
4. Terhadap penyampaian laporan akhir triwulanan tingkat unit kerja tersebut, dilakukan penilaian secara berkala oleh UKI-E1 sebagai bahan untuk pembinaan dan evaluasi kinerja pelaporan UKI Kanwil Ditjen Perbendaharaan (UKI-W).
5. Hasil penilaian terhadap pelaksanaan pemantauan pengendalian intern pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan periode Triwulan IV tahun 2017 diperoleh nilai rata-rata sebesar 99,84 dengan sebaran data sebagai berikut (rincian terlampir):

No.	Rentang Nilai	Jumlah Unit Kerja
1)	$110 \leq x < 120$	0
2)	$100 \leq x < 110$	19
3)	$90 \leq x < 100$	14
4)	$80 \leq x < 90$	-
5)	$x < 80$	-

6. Berdasarkan Laporan Akhir Triwulanan Tingkat Unit Kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan periode Triwulan IV tahun 2017, tidak terdapat informasi terkait adanya temuan yang bersifat segera dan temuan yang berindikasi *fraud* dari hasil pemantauan pengendalian intern oleh UKI-W pada 3 (tiga) kegiatan yang menjadi obyek pemantauan sebagaimana dimaksud di atas.
7. Beberapa temuan sudah menghasilkan rekomendasi dan tindak lanjut, namun rekomendasi dan tindak lanjut beberapa diantaranya masih berupa rekomendasi yang bersifat korektif, dan hanya memberikan himbauan untuk melengkapi atau melaksanakan atribut yang menjadi temuan tersebut, selanjutnya agar rekomendasi tersebut bersifat substantif dalam rangka meminimalisasi penyebab terjadinya temuan.

8. Dalam rangka peningkatan komitmen pimpinan dalam pelaksanaan pengendalian internal sebagai perwujudan zona integritas di lingkungan Ditjen Perbendaharaan dimohon agar Kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan langkah-langkah antara lain melakukan pembahasan hasil pemantauan pengendalian internal secara periodik setiap akhir triwulanan dengan seluruh Bidang/Bagian yang menjadi obyek pemantauan (dikoordinasikan oleh Bidang SKKI).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Direktorat Jenderal,

Maryana

NIP 19600603 198502 1 001

**EVALUASI LAPORAN AKHIR TRIWULANAN
PELAKSANAAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN
UNIT KERJA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN
PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2017**

No.	Unit Kerja Kanwil	Nilai	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kanwil DJPBN Provinsi Aceh	96.21	- Terdapat temuan - Tidak ada rekomendasi dan tindak lanjut substantif - Nama kegiatan dan jumlah pengendalian utama dalam kegiatan pemrosesan tagihan dalam rangka pembayaran kegiatan penyediaan barang/jasa melalui pengadaan langsung dengan mekanisme LS belum sesuai dengan S-4347/PB.1/2017
2	Kanwil DJPBN Provinsi Sumatera Utara	100.00	- Tidak ada temuan
3	Kanwil DJPBN Provinsi Sumatera Barat	100.00	- Tidak ada temuan
4	Kanwil DJPBN Provinsi Riau	100.00	- Tidak ada temuan
5	Kanwil DJPBN Provinsi Jambi	100.00	- Tidak ada temuan
6	Kanwil DJPBN Provinsi Sumatera Selatan	100.00	- Tidak ada temuan
7	Kanwil DJPBN Provinsi Lampung	102.97	- Terdapat temuan - Terdapat rekomendasi dan tindak lanjut substantif
8	Kanwil DJPBN Provinsi Bengkulu	100.00	- Tidak ada temuan
9	Kanwil DJPBN Provinsi Bangka Belitung	98.96	- Terdapat temuan - Tidak ada rekomendasi dan tindak lanjut substantif
10	Kanwil DJPBN Provinsi Banten	99.96	- Terdapat temuan - Tidak ada rekomendasi dan tindak lanjut substantif
11	Kanwil DJPBN Provinsi DKI Jakarta	100.00	- Tidak ada temuan
12	Kanwil DJPBN Provinsi Jawa Barat	100.00	- Tidak ada temuan
13	Kanwil DJPBN Provinsi Jawa Tengah	99.997	- Terdapat temuan - Tidak ada rekomendasi dan tindak lanjut substantif
14	Kanwil DJPBN Provinsi Yogyakarta	99.95	- Terdapat temuan - Tidak ada rekomendasi dan tindak lanjut substantif
15	Kanwil DJPBN Provinsi Jawa Timur	100.00	- Tidak ada temuan
16	Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Barat	99.95	- Terdapat temuan - Tidak ada rekomendasi dan tindak lanjut substantif
17	Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Tengah	99.99	- Terdapat temuan - Tidak ada rekomendasi dan tindak lanjut
18	Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Selatan	100.00	- Tidak ada temuan
19	Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Timur	100.00	- Tidak ada temuan
20	Kanwil DJPBN Provinsi Bali	99.96	- Terdapat temuan - Tidak ada rekomendasi dan tindak lanjut substantif
21	Kanwil DJPBN Provinsi NTB	100.00	- Tidak ada temuan
22	Kanwil DJPBN Provinsi NTT	97.79	- Keterlambatan Terdapat temuan - Tidak ada rekomendasi dan tindak lanjut

No.	Unit Kerja Kanwil	Nilai	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
23	Kanwil DJPBN Provinsi Sulawesi Selatan	99.99	- Terdapat temuan - Tidak ada rekomendasi dan tindak lanjut substantif
24	Kanwil DJPBN Provinsi Sulawesi Tengah	100.00	- Tidak ada temuan
25	Kanwil DJPBN Provinsi Sulawesi Tenggara	100.00	- Tidak ada temuan
26	Kanwil DJPBN Provinsi Gorontalo	99.99	- Terdapat temuan
27	Kanwil DJPBN Provinsi Sulawesi Utara	100.00	- Tidak ada temuan
28	Kanwil DJPBN Provinsi Maluku Utara	99.98	- Terdapat temuan - Tidak ada rekomendasi dan tindak lanjut substantif
29	Kanwil DJPBN Provinsi Maluku	99.00	- Tidak ada temuan
30	Kanwil DJPBN Provinsi Papua	100.00	- Tidak ada temuan
31	Kanwil DJPBN Provinsi Kepulauan Riau	99.97	- Terdapat temuan - Tidak ada rekomendasi dan tindak lanjut substantif
32	Kanwil DJPBN Provinsi Sulawesi Barat	100.00	- Tidak ada temuan
33	Kanwil DJPBN Provinsi Papua Barat	100.00	- Tidak ada temuan
Rata-Rata		99.84	